



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/244 YEAR 2025

ABOUT
SECOND AMENDMENT TO GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 90 YEAR 2025 ABOUT BENEFICIARY GRANT
IN THE FORM OF CASH IN THE SOCIAL, WOMEN EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION PROVINCE PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. that there is a change in the list of grant recipients in the Social, Women Empowerment and Child Protection Agency, it is necessary to review again the Governor of Papua Tengah 100.3.3.1/ 90 Year 2025 about Beneficiary Grant in the Form of Cash in the Social, Women Empowerment and Child Protection Agency of Papua Tengah for change;
 - c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to set the Governor's Decision about the Second Amendment to the Governor of Papua Tengah Number 100.3.3.1/ 90 Year 2025 about Beneficiary Grant in the Form of Cash in the Social, Women Empowerment and Child Protection Agency of Papua Tengah;
- Mengingat :
- 1. Law Number 21 Year 2001 about Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2001 Number 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4151), as has been changed several times with the latest Law Number 2 Year 2021 about the Second Amendment to Law Number 21 Year 2001 about Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2021 Number 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6697);

2. Law...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 90 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

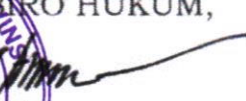
Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 90 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YOHANES MENURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197806082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 244 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/ 90 TAHUN 2025 TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	Penerima	Besaran (Rp)
1	TP-PKK Provinsi Papua Tengah	10.000.000.000,00
2	Yayasan Siloam Papua Nabire	1.500.000.000,00
3	Yayasan Tiga Putra Satu Putri	3.000.000.000,00
4	Yayasan Setia Arastamar Bagi Bapa Sorgawi (SABAS)	500.000.000,00
5	Yayasan Sosial Cinta Kasih Miracle Mimika	2.000.000.000,00
6	Yayasan Honai Papua Tengah Sejahtera	2.000.000.000,00
7	Yayasan Kangguru Aguyumai Kornelis	2.000.000.000,00
JUMLAH		21.000.000.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,
KEMENTERIAN KEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH
SALINAN MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 7606082002121002

